

Judul : Premium di Jawa-Bali dipangkas
Tanggal : Kamis, 03 Juni 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 9

Premium di Jawa-Bali Dipangkas

Kuota Premium tahun depan dikurangi, Pertamina siap pasok Pertalite.

■ INTAN PRATIWI

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, kuota bahan bakar minyak (BBM) Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) akan dikurangi. Pemangkas kuota Premium itu akan dilakukan pada tahun depan.

Arifin mengungkapkan opsi pengurangan Premium saat menjawab pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam rapat kerja dengan Komisi VII di Jakarta, Rabu (2/6). Dalam raker, Mulyanto menanyakan perihal BBM Premium yang terlihat akan resmi dihapus.

Mulyanto tidak melihat BBM jenis tersebut dalam daftar subsidi tahun 2022. "Premium apakah resmi dihapus di 2022 karena tidak ada di daftar subsidi?" kata Mulyanto.

Menjawab pertanyaan Mulyanto, Arifin mengatakan, kuota Premium akan dikurangi khusus di wilayah Jamali karena alasan lingkungan. "Jadi,

untuk Premium ini memang disebabkan oleh masalah emisi, memang akan dikurangi di daerah Jamali, Jawa-Madura-Bali, sementara di luar Jamali masih tetap dilakukan suplai Premium," kata Arifin.

Sebagai gantinya, untuk Jamali, pemerintah akan menyediakan stok Pertalite yang dinilai lebih ramah lingkungan. "Sebagai gantinya, untuk Jamali ini masuk Pertalite karena Pertalite ini lebih ramah lingkungan," kata Arifin.

Wacana penghapusan Premium sebenarnya bukan terjadi kali ini saja. Pada tahun lalu, misalnya, Arifin mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan Premium ke Pertalite.

Negara-negara lain diketahui sudah tidak lagi menggunakan Premium. Hingga kini, hanya lima negara yang masih menggunakan Premium, termasuk Indonesia.

Arifin menegaskan, pemerintah ingin melaksanakan uji coba penghapusan Premium di Jawa, Madura, dan Bali secara bertahap. Pertamina telah

memulai uji coba penggantian Premium dengan Pertalite di Bali. "Selain Bali, ada empat daerah lagi uji coba Pertalite menggantikan Premium," kata Arifin.

Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Alfon Simanjuntak mengatakan, mengenai penentuan kuota BBM bersubsidi, pihaknya dalam hal ini mengikuti kebijakan yang sedang diberlakukan oleh menteri ESDM. Nantinya, jika memang menteri ESDM memangkas kuota Premium, perlu ada kebijakan yang melandasinya.

"Soal kuotanya berapa, memang usulan dari BPH Migas. Namun, terkait

kebijakan pengurangan atau meniadakan Premium, itu kebijakan ESDM. Setelah menteri ESDM memutuskan, baru BPH Migas menghitung ulang kuotanya," kata Alfon kepada *Republika*.

Terkait dengan kebijakan pemangkas Premium tersebut, PT Pertamina (Persero) menjamin pasokan Pertalite sebagai gantinya. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading (SH C&T) Putut Andriatno menegaskan, Pertamina siap menjalankan kebijakan tersebut.

Putut juga mengatakan, Pertamina siap memasok kebutuhan Pertalite untuk masyarakat. "Pertamina sudah menyiapkan Pertalite di semua SPBU Pertamina. Jika ada kebijakan seperti itu, Pertamina sudah siap. Kami akan mengikuti kebijakan dari regulator," ujar Putut kepada *Republika*.

Putut menyampaikan, pola konsumsi masyarakat saat ini sudah berubah. Ia menjelaskan, masyarakat semakin sadar soal pentingnya menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. "Konsumsi masyarakat ke BBM yang lebih ramah lingkungan memang lebih meningkat," kata Putut.

■ ed: citra listya rini



Selain Bali, ada empat daerah lagi uji coba Pertalite menggantikan Premium.